

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013-2022**

Fauziah Nur,¹ Zuwardi,²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : fauiiyahnurr258@gmail.com *

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : zuwardiyyzi84@gmail.com

Abstract

Regional government financial performance will show the level of achievement of work results in the regional finance sector using the financial system through statutory policies during a certain period. So that regional governments are expected to be able to optimize the performance of the budget that is determined and approved. Regional government as one of the representatives of the central government in each region has a crucial role, especially related to the welfare of the people. Islam itself emphasizes that achieving prosperity that originates from public finances must be managed optimally for the needs and prosperity of increasing the benefit of the people. This research is motivated by the lack of independence of regional governments, which shows that balancing funds from the central government are greater than local original income. This shows that regional governments are still dependent on the central government, which can result in a decline in regional government financial performance. In Islamic economics, humans are ordered to distribute their income so that it does not circulate to some people and avoid income disparities that can make poor people more miserable and rich people become richer. The results of this research show that Regional Original Income has a positive effect on local government financial performance, Balancing Funds has a negative effect on local government financial performance. Meanwhile, Regional Original Income and Balancing Funds have a significant effect on regional government financial performance.

Keyword: *locally-generated revenue, balancing fund, regional government financial performance*

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan perundang-undangan selama periode tertentu. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja anggaran yang ditetapkan dan disahkan. Pemerintah daerah sebagai salah satu perwakilan pemerintah pusat di

setiap daerah mempunyai peran yang krusial, terutama terkait dengan mensejahterakan rakyat. Dalam islam sendiri menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber. Pada keuangan publik harus dikelola secara optimal demi kebutuhan dan kemakmuran dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tidak kemandirian pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam ekonomi islam memerintahkan manusia untuk mendistribusikan pendapatannya agar tidak beredar pada sebagian orang dan menghindari terjadinya disparitas pendapatan yang dapat menjadikan orang yang miskin semakin sengsara dan yang kaya menjadi lebih kaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu delegasi pemerintah federal di setiap daerah, pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah memiliki sebagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi kewenangannya dan menggunakan sepenuhnya sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikenal dengan otonomi daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah daerah sesuai dengan hak otonominya.(Maulina et al., 2021) Agar pemerintah mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah disusun, kinerja keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan derajat pencapaian hasil kerja sektor keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan. Melalui kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu tertentu. telah ditentukan dan disahkan (Ni Putu Ayu Septiyani Putri & Gede Adi Yuniarta, 2023).

Islam adalah agama yang sangat berhati-hati dalam hal kepemimpinan, sehingga pengelolaan anggaran apa pun yang melibatkan pembagian jumlah yang berbeda dari ibu kota ke daerah lain harus mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Seorang pemimpin tidak bisa dianggap efektif jika orang-orang yang dipimpinnya terus hidup dalam kondisi miskin. Karena kekayaan sumber daya alam bangsa kita yang bisa dikelola berpotensi menjadi makmur; Namun jika pemimpin tidak mampu mengendalikan sumber daya tersebut, maka kesejahteraan tidak akan tercapai dan konsep otonomi daerah tidak akan terwujud.(Fuad, 2017) Islam menekankan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang, kekayaan yang berasal dari dana publik harus dikelola dengan baik, memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kelebihan. Kebijakan negara harus berfungsi secara seimbang untuk mencapai semua aspek tujuan kesejahteraan publik dan non-publik.(Farhadi Arifiansyah et al., 2022)

Ekonomi Islam berpendapat bahwa negara mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam urusan perekonomian pribadi, baik untuk mengawasi maupun melaksanakan tugas-tugas ekonomi tertentu yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat. Karena perekonomian masih relatif sederhana pada awal Islam, keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi cukup terbatas (Djawahir Hejaziey, 2011). Sebagaimana diketahui, zakat memberikan pendanaan bagi negara-negara Islam. Semua umat Islam diwajibkan membayar zakat, yang bisa berupa uang tunai, hewan, atau produk pertanian. Pemerintah dengan kerangka Islam wajib mengawasi zakat. Menerima, mengelola, mendistribusikan, bahkan mempunyai kewenangan untuk memaksa pihak yang tidak mau membayar zakat (Rizqulloh et al., 2023)

Kapasitas suatu daerah dalam menemukan dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan berjalannya sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Agar otonomi daerah dapat berjalan efektif, maka pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik agar dapat membiayai operasional daerah dengan cara mengambil kekayaan asli daerah (Padang, 2023).

Suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari potensi daerahnya dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai pemerintahan daerah dan melaksanakan pembangunan daerah.(Rahayu et al.,

2023) Sebagai sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam upaya membangun kemandirian daerah. aliran pendapatan yang konsisten dengan pendanaan pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan umum dan proyek pembangunan. Otonomi alokasi anggaran APBD akan memberikan manfaat bagi kemandirian PAD bagi daerah.(Nauw, 2021)

Sementara itu, struktur APBD sebagian besar pendanaannya berasal dari Dana Perimbangan, yang merupakan sumber daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah uang yang diperoleh dari pendapatan APBD yang disalurkan ke daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.(Istiza et al., 2021) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Dana Perimbangan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tujuan dana perimbangan adalah untuk menunjang pembiayaan otonomi daerah. program.(Asmar, 2017)

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah terbatasnya kapasitas mereka untuk menyelidiki kemungkinan sumber pendapatan daerah yang mandiri, yang kemudian meningkatkan ketergantungan mereka pada transfer pemerintah daerah. Terdapat sedikit variasi persentase APBD Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ketahun; Sekitar 65% pendapatan daerah bersumber dari Pemerintah Pusat, dan hanya kurang lebih 35% yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Asmin Patros, anggota Fraksi Golkar Partai Demokrasi Kepri, mengatakan persentase pendapatan tersebut menunjukkan ketergantungan Kepri yang masih kuat terhadap Pemerintah Pusat.(Saptiyulda, 2019)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan enam kabupaten/kota di Kepri yang masih mengandalkan pendapatan transfer pusat berada dalam postur APBD. Ia mengklaim, dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepri, hanya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Batam yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, terbukti dengan porsi transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah yang hampir seimbang. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, Tito juga meminta agar Pemerintah Daerah Kepri memiliki kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan PAD. Oleh karena itu, daerah tidak harus bergantung sepenuhnya pada Pemerintah Pusat dan bisa lebih mandiri.(Zulfikar, 2023)

Dengan memperkuat kapasitasnya dalam menciptakan sumber daya keuangan, pemerintah daerah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan

keuangan daerah dapat membantu mengurangi penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Informasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013–2022 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2022
(Ribu Rupiah)

Pemerintah Kab/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	KKPD
Kabupaten Natuna	2013	41.890.798.570	1.189.088.858.540	1.310.672.135.494	97.43
	2014	39.404.360.299	1.019.680.093.777	1.156.310.939.623	95.44
	2015	35.211.059.623	709.384.500.782	800.848.884.682	97.92
	2016	53.414.566.344	1.045.054.813.503	1.218.903.952.006	95.22
	2017	68.704.602.095	792.799.529.965	974.020.353.335	97.01
	2018	47.952.668.665	813.630.180.398	969.214.535.605	94.77
	2019	56.417.450.263	1.145.678.638.470	1.350.963.641.175	94.64
	2020	51.528.266.743	718.829.186.603	926.418.003.270	90.31
	2021	42.613.221.800	906.392.990.843	968.639.262.049	102.66
	2022	60.737.379.350	922.596.402.411	989.275.275.868	105.96
Kabupaten Kepulauan Anambas	2013	31.123.666.112	871.388.702.343	940.910.996.389	99.48
	2014	21.489.585.793	773.581.402.805	858.272.443.166	95.04
	2015	17.218.368.878	550.751.056.290	639.319.132.142	91.95

	2016	34.180.165.616	800.161.450.6 45	929.170.240.4 21	94.05
	2017	43.788.185.05 6	657.349.246.8 66	780.240.497.3 23	96.51
	2018	35.178.837.744	716.579.765.31 4	837.725.038.5 34	94.62
	2019	36.560.321.315	985.056.008.4 11	1.121.205.421.7 31	94.82
	2020	31.634.242.246	635.267.105.53 1	816.788.855.6 34	86.61
	2021	33.325.052.263	799.054.499.1 27	845.562.863.7 56	102.0 6
	2022	27.169.549.67 8	783.315.186.38 9	824.553.991.9 53	101.74
Kabupaten Karimun	2013	272.557.903.9 89	673.121.433.21 5	1.050.857.576. 156	130.7 6
	2014	310.386.407.10 1	625.739.901.13 4	1.054.154.143.5 20	138.3 9
	2015	360.641.751.64 3	501.286.982.17 3	968.683.374.3 63	160.91
	2016	397.519.426.16 7	682.952.118.38 3	1.188.230.672. 526	149.12
	2017	391.618.720.92 8	666.919.062.8 21	1.144.433.759. 944	151.02
	2018	349.015.269.51 8	782.262.123.75 3	1.289.048.277. 394	132.36
	2019	356.972.035.8 39	777.012.011.114	1.273.170.269. 028	134.9 9
	2020	295.338.951.0 81	769.278.643.2 34	1.224.605.756. 687	125.31
	2021	454.382.443.3 25	776.223.335.63 6	1.314.722.581.2 89	152.13
	2022	326.247.200.6 92	900.458.448.4 59	1.228.779.961. 997	136.0 6
Kota Batam	2013	606.339.970.3 77	980.405.748.2 64	1.749.105.115.3 24	152.55

	2014	779.944.837.4 51	969.923.629.8 00	2.021.540.370. 495	166.9 6
	2015	836.713.858.3 42	849.850.347.8 82	1.936.406.807. 580	185.53
	2016	881.268.969.1 57	991.714.849.9 32	2.215.680.286. 682	173.38
	2017	974.124.203.6 84	962.500.055.6 68	2.157.662.190. 348	190.9 4
	2018	1.084.640.559. 853	897.475.587.1 49	2.360.092.860 .080	204.8 2
	2019	1.147.685.950. 193	1.047.591.586. 828	2.522.890.256. 865	196.5 6
	2020	975.283.123.57 6	1.174.465.484. 544	2.577.504.994. 815	166.4 3
	2021	1.094.019.332. 634	1.275.530.823.1 96	2.527.649.538. 975	179.0 5
	2022	1.282.185.392. 071	1.554.043.692. 257	2.848.972.905. 176	182.0 4
Kota Tanjungpin ang	2013	105.583.015.26 7	674.763.145.5 42	833.677.313.31 4	109.2 3
	2014	125.170.740.48 5	624.006.093.6 18	858.769.181.71 1	107.28
	2015	122.893.490.2 41	460.333.937.8 44	697.658.775.3 11	110.28
	2016	126.045.740.7 38	708.913.132.17 4	948.661.599.2 46	105.33
	2017	161.711.370.67 6	692.248.533.5 72	913.479.668.12 4	116.84
	2018	160.470.588.5 94	699.727.386.8 19	921.104.842.11 7	116.31
	2019	148.494.445.0 12	704.171.158.15 6	985.973.161.6 81	107.55
	2020	145.817.521.91 4	738.500.019.3 34	1.008.519.186. 182	107.71
	2021	135.594.423.07 7	743.465.611.20 7	919.187.483.58 4	113.86

	2022	180.328.427.0 31	837.596.728.9 99	1.025.544.664. 712	120.77
Kabupaten Lingga	2013	29.526.149.63 0	626.253.899.0 98	718.947.802.13 2	95.91
	2014	21.010.343.891	559.642.025.7 89	686.009.067.5 40	88.38
	2015	20.305.789.39 7	471.125.453.89 4	572.323.921.42 3	90.16
	2016	21.017.262.865	604.289.808.9 32	751.268.344.3 61	87.37
	2017	22.146.867.68 4	615.990.804.7 16	744.753.381.78 2	89.27
	2018	30.072.594.172	704.376.691.0 07	843.812.824.7 65	91.29
	2019	37.492.637.24 6	724.084.270.7 67	904.253.114.60 1	89.38
	2020	52.601.645.66 2	752.603.671.34 0	961.112.516.06 5	90.75
	2021	61.794.795.174	838.054.775.0 55	921.540.010.22 9	105.01
	2022	31.080.128.502	879.942.299.4 99	915.550.741.75 3	103.0 3
Kabupaten Bintan	2013	136.547.923.74 4	671.121.433.215	916.419.942.25 2	108.4 7
	2014	190.843.040.4 64	596.250.029.8 22	883.789.695.2 60	121.05
	2015	186.630.240.7 75	497.680.184.1 31	781.766.291.28 7	125.03
	2016	206.292.379.2 07	725.210.317.43 2	1.048.554.882. 697	117.27
	2017	257.000.773.2 32	712.750.581.44 9	1.059.986.596 .392	127.53
	2018	286.602.276.5 50	740.417.202.56 4	1.128.432.282.2 11	129.07
	2019	372.155.030.10 8	805.321.051.21 7	1.321.912.600.2 09	135.28

	2020	165.752.528.83 7	821.578.900.31 1	1.206.127.115.8 86	102.02
	2021	195.745.874.5 85	870.158.338.81 7	1.105.990.844. 797	125.82
	2022	195.413.269.45 3	962.761.964.6 72	1.161.198.545.9 64	120.02

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024)

Pada tabel 1 dapat diperjelas dengan beberapa uraian data kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada Kabupaten Natuna dilihat kinerja keuangannya mengalami penurunan pada tahun 2013-2020 sebesar 90,31% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 105,96%. Pada Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat kinerja keuangannya mengalami penurunan pada tahun 2013-2015 sebesar 91,95% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 101,74%. Pada Kabupaten Karimun dilihat kinerja keuangannya mengalami kenaikan pada tahun 2013-2017 sebesar 151,02% dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 136,06%. Pada Kota Batam dilihat kinerja keuangannya mengalami kenaikan pada tahun 2013-2018 sebesar 204,82% dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 182,04%. Pada Kota Tanjungpinang dilihat kinerja keuangannya mengalami penurunan pada tahun 2013-2019 sebesar 107,51% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 120,77%. Pada Kabupaten Lingga dilihat kinerja keuangannya mengalami penurunan pada tahun 2013-2016 sebesar 87,37% dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 103,03%. Pada Kabupaten Bintan dilihat kinerja keuangannya mengalami kenaikan pada tahun 2013-2019 sebesar 135,28% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 120,02%.

II. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena menggunakan angka-angka dan di analisis menggunakan program SPSS Versi 25. Penulis menggunakan sumber sekunder untuk mendapatkan data untuk penelitian ini. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyediakan data sekunder untuk penelitian ini. Website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyediakan akses terhadap laporan ini (DJPK) di www.djpk.kemenkeu.go.id. Selain itu, sejumlah publikasi online, jurnal, dan artikel memberikan dukungan terhadap penelitian ini. Tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 hingga 2022 menjadi populasi penelitian. *Non Probability sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan atau kesempatan yang sama kepada setiap elemen atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel, merupakan strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan total 7 data set yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota dalam kurun waktu 10 tahun untuk mengkaji Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1) Rasio Kemandirian

Besarnya pendapatan asli daerah yang diterima dibagi dengan besarnya pendapatan transfer dari pemerintah federal, negara bagian, dan daerah serta pinjaman daerah menghasilkan rasio kemandirian keuangan daerah.(Mahmudi, 2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2) Rasio Ketergantungan

Dengan membandingkan besarnya pendapatan transfer yang diterima pendapatan daerah dengan seluruh besaran pendapatan daerah maka dapat ditentukan rasio ketergantungan keuangan daerah.(Mahmudi, 2016)

$$\text{Rasio Ketergantungan} : \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah.(Mahmudi, 2016)

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

III. Hasil dan Pembahasan

1) Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Grafik plot probabilitas normal digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal untuk melakukan uji normalitas. One-Sample Kolmogorov Smirnov juga dilakukan dalam uji normalitas ini, dengan tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini dasar pengambilan keputusan:

- a) Data berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05;

b) Data tidak berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05.

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	851,18296255
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,055
	Negative	-,098
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,090 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikasi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi dapat terpenuhi.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Batas dari nilai tolerance adalah $\geq 0,10$ atau nilai VIF adalah ≤ 10 .

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	11583,14 7	476,99 1		24,28 4	,00 0		
	Pendapatan Asli Daerah	9,930E- 9	,000	1,044	25,58 4	,00 0	,694	1,44 1
	Dana Perimbangan	-2,677E- 9	,000	-,170	-4,155	,00 0	,694	1,44 1
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan								

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa angka tolerance dari masing-masing variabel independen memiliki angka > 10 . Pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai tolerance 0,694 ($0,694 > 10$), Dana Perimbangan (X_2) memiliki nilai tolerance 0,694 ($0,694 > 10$). Uji multikolinearitas juga dapat dilihat dari semua variabel independen memiliki angka VIF < 10 . Pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai VIF 1,441 ($1,441 < 10$), Dana Perimbangan (X_2) memiliki nilai VIF 1,441 ($1,441 < 10$). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah multikolinearitas atau seharusnya tidak terjadi regresi antara variabel independen.

3) Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah confounding error pada periode t dan confounding error pada periode $t-1$ (sebelumnya) berkorelasi dalam model regresi linier. Masalah autokorelasi muncul ketika ada korelasi. Karena pengamatan selanjutnya sepanjang waktu saling terikat satu sama lain, autokorelasi berkembang. Regresi tanpa autokorelasi dianggap sebagai model regresi yang baik. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik. Uji Durbin-Watson (DW Test) merupakan metode yang sering digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- Nilai DW dibawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif;
- Nilai DW diantara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi;
- Nilai DW di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,961 ^a	,923	,920	863,79377	1,939
a. Predictors: (Constant), DanaPerimbangan, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Sumber : Data Diolah (2024)

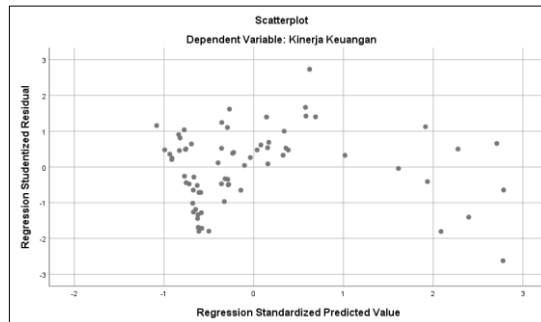
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,939, sementara pada tabel Durbin Watson dengan signifikansi 0,05, jumlah sampel sebanyak 70 serta jumlah variabel independen sebanyak 2 variabel ($K=2$) diperoleh nilai dL sebesar 1,5542 dan dua sebesar 1,6715. Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4-dU$, maka dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai Durbin Watson terletak diantara dU dan $4-dU$. Data dU sebesar 1,6715 sehingga $4-dU$ adalah sebesar 2,328 maka hasilnya $1,6715 < 1,939 < 2,328$. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan varians antara residu dua observasi dalam model regresi. Model regresi homoskedastik adalah model yang bagus. Hal-hal berikut ini menjadi dasar pengambilan keputusan:

- a) Terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit);
- b) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 (nol) pada sumbu Y.

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Diolah (2024)

Tampilan keluaran scatterplot pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Titik-titiknya juga tersebar dengan jelas, khususnya di atas dan di bawah sekitar angka nol pada sumbu Y. Hasilnya, data penelitian bebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.

5) Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antar dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

Tabel 5
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11583,147	476,991		24,284	,000
	Pendapatan Asli Daerah	9,930E-9	,000	1,044	25,584	,000
	Dana Perimbangan	-2,677E-9	,000	-,170	-4,155	,000

a. DependentVariable: KinerjaKeuangan

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber :Data Diolah (2024)

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis, yaitu:

$$KK = 11583,147 + 9,930 - 2,677 + e$$

Berdasarkan regresi linear berganda, maka dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta sebesar 11583,147 artinya ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1 = 0$, $X_2 = 0$) maka kinerja keuangan hasilnya konstan 11583,147.
- 2) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,930 yang artinya apabila terjadi penambahan PAD sebesar 1% maka akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 9,930.
- 3) Koefisien Dana Perimbangan sebesar -2,677 yang artinya apabila terjadi penambahan Dana Perimbangan sebesar 1% maka akan mengalami penurunan sebesar -2,677.

6) Uji Hipotesis (Uji T)

Intinya uji t untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. 0,05 digunakan sebagai ambang signifikansi ($\alpha = 5\%$) untuk pengujian. Berdasarkan standar berikut, hipotesis diterima atau ditolak:

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11583,147	476,991		24,284 ,000
	Pendapatan Asli Daerah	9,930E-9	,000	1,044	25,584 ,000

Dana Perimbangan	-2,677E-9	,000	-,170	-4,155	,000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 untuk menunjukkan hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung > t tabel dimana nilai t hitung 25,584 dan nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan $df = n - 2 - 1$ atau $70 - 2 - 1 = 67$ adalah 1,99601. Nilai signifikansi penelitian adalah 0,000 dan nilai = 0,05. Jadi nilai t hitung > nilai t tabel (25,584 > 1,99601) dan nilai signifikansi penelitian < nilai (0,000 < 0,05). Artinya terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2022 atau hipotesis H_1 diterima.
- b) Variabel Dana Perimbangan memiliki t hitung > t tabel dimana nilai t hitung -4,155 dan t tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan $df = n - 2 - 1$ atau $70 - 2 - 1 = 67$ adalah 1,99601. Nilai signifikansi penelitian 0,000 dan nilai = 0,05. Jadi nilai t hitung > t tabel (-4,155 > 1,99601) dan nilai signifikansi penelitian < nilai (0,000 < 0,05). Artinya terdapat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2022 atau hipotesis H_2 diterima.

7) Uji Simultan (Uji F)

Tujuan uji F adalah untuk mengetahui kelayakan atau kecocokan model yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Faktor independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara kolektif jika kemungkinan (signifikansi) lebih besar dari 0,05. Faktor-faktor independen tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika probabilitasnya kurang dari 0,05.

Tabel 7
Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	595901480,734	2	297950740,367	399,323	,000 ^b
	Residual	49991358,066	67	746139,673		
	Total	645892838,800	69			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah						

Sumber : Data Diolah (2024)

Uji simultan, yang sering disebut dengan uji F, menghasilkan nilai F terhitung sebesar 399,323 dengan tingkat signifikansi 0,000, seperti ditunjukkan pada tabel 7. Signifikansinya jauh di bawah 0,05. Nilai Ftabel = 3,13 ditemukan dengan derajat penyebut (db2)=n-k-1 =70-2-1 dan derajat pembilang (dk1) = 1k = 5. Fhitung dan Ftabel dibandingkan untuk menguji hipotesis yang sudah ada didirikan. Setelah diperoleh hasil Fhitung melebihi Ftabel (399.323 > 3.13), maka ditetapkan bahwa pengujian statistik secara simultan menghasilkan temuan yang signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2022, kombinasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

8) Uji Koefisien Determinasi

Tujuan Uji Koefisien Determinasi atau R² adalah untuk mengukur sejauh mana fluktuasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh model. Nilai R² berkisar antara 0 sampai 1. Semakin baik kinerja model regresi dalam mendeskripsikan variabel terikat, maka semakin mendekati 1, dan semakin kecil kemampuan variabel bebas secara keseluruhan untuk menjelaskan variabel terikat, maka semakin kecil R² (mendekati 0).

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961 ^a	,923	,920	863,79377
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan				

Sumber : Data Diolah (2024)

Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan koefisien determinasi. Terlihat dari tabel sebelumnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,920. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menyumbang 92% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian menyumbang sisa $100\% - 92\% = 8\%$.

Pembahasan

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25, pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terbukti baik. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung dalam arah positif sebesar 25,584 ($25,584 > 1,99601$). Dengan demikian, teori (H_1) disetujui. Temuan pengujian menunjukkan adanya hubungan positif signifikan terhadap variabel jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan koefisien variabel bertanda positif. Kesimpulan: Kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi positif oleh pendapatan asli daerah.

2) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dampak dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan ujistatistik yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25 menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai dampak negatif. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan t hitung dengan arah negatif sebesar -4,155 ($4,155 > 1,99601$), koefisien negatif, dan nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Dengan kata lain, terdapat korelasi substansial antara temuan tes dan arah negatif variabel. Kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau diketahui terkena dampak negatif dari Dana Perimbangan pada tahun 2013 hingga tahun 2022.

3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai F_{hitung} sebesar 399,323 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sesuai dengan hasil uji signifikansi simultan (Uji F). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada

kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau. Variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 92% terhadap variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, dan sisanya sebesar 8% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Temuan tersebut didukung oleh hasil uji koefisien determinasi ($Uji R^2$) yang mempunyai nilai sebesar 0,920 atau 92%.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2022”**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat secara signifikan melalui pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini agar pendapatan asli daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah.
- 2) Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dirugikan oleh Dana Perimbangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah menurun seiring dengan besarnya dana perimbangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dana perimbangan yang lebih besar akan membuat pemerintah daerah lebih bergantung pada pembayaran transfer federal.
- 3) Dampak gabungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah cukup besar. Variabel terikat akan bergerak searah jika kedua variabel bebas naik atau turun secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, A.R. (2017). Dana Perimbangan Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 1.
- Djawahir Hejazziey. (2011). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi. *Al-Qalam*, 28, 535–558.
- Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, & Duta Bintang Fitriyah. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 1–14.
- Fuad, K. (2017). Model Alokasi Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah

- (Pad) Untuk Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 41.
- Istiza, D., Feblin, A., & Yulitiawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal ETAP*, Vol. 2 No(13), 47–61.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ket). UPP STIM YKPN.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. sals. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 390–399.
- Nauw, E. T. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 390.
- Ni Putu Ayu Septiyani Putri, & Gede Adi Yuniarta. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147.
- Padang, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(2), 163–176.
- Rahayu, Y. W., Nugroho, T. R., Isnaini, N. F., & Hartono. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 144–158.
- Rizqulloh, A. Z., Fikri, M., Sururi, H., Anjani, D., Rohim, A. N., & Korespondensi, P. (2023). Sumber Pendapatan Non Zakat Negara dalam Islam dan Perbandingannya dengan Zaman. 2(2), 205–225.
- Saptiulda, E. (2019). 65 persen APBD Kepri bergantung pada APBN. ANTARA. <https://m.antaranews.com/amp/berita/996932/65-persen-apbd-kepri-bergantung-pada-apbn>
- Zulfikar. (2023). Masih Bergantung dari Transfer, Tito Soroti Postur APBD 6 Pemda Kepri. *Harian Kepri*.